



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/6516/KSP.00/70-76/10/2024 08 Oktober 2024  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pencegahan  
Korupsi Pengelolaan Kawasan Wisata  
Konservasi Perairan Raja Ampat

**Yth. Undangan (daftar terlampir)**

di

Tempat

Berdasarkan ketentuan pasal 6 huruf b dan d Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik, serta supervisi terhadap instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Berkenaan hal tersebut dan dalam rangka pencegahan Korupsi terkait Pengelolaan Kawasan Konservasi di Perairan Kepulauan Raja Ampat, maka menindaklanjuti hasil Reviu (LHR) serta pemeriksaan khusus (LHP) yang telah dilakukan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Inspektorat Pemda Kabupaten Raja Ampat, Satuan Tugas Direktorat Koordinasi Supervisi Wilayah V KPK bermaksud untuk melaksanakan Kegiatan Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat pada :

Hari/Tanggal : Kamis/17 Oktober 2024  
Waktu : 09.00 WIT s/d Selesai  
Tempat : Kantor Gubernur Papua Barat Daya  
Agenda : Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pencegahan Korupsi Pengelolaan  
Kawasan Wisata Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat

Sehubungan hal tersebut di atas, mohon berkenan Saudara menugaskan dan menghadirkan seluruh Pejabat dan Struktural Organisasi Perangkat Daerah (OPD/SKPD) yang terkait dengan kegiatan ini (susunan acara terlampir).

Untuk koordinasi lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Ben Hardy Saragih di nomor HP 0813-8431-5312 atau *email* ben.saragih@kpk.go.id.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.

a.n. Pimpinan

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi

Komisi Pemberantasan Korupsi,



*Dokumen ini ditandatangani secara digital*

Didik Agung Widjanarko

Tembusan:

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
2. Inspektur Komisi Pemberantasan Korupsi

Lampiran Surat I

Nomor : B/6516/KSP.00/70-76/10/2024

Tanggal : 08 Oktober 2024

**Daftar Undangan  
Pejabat dan Struktural Organisasi Perangkat Daerah (OPD/SKPD)**

1. Provinsi Papua Barat Daya: Pj. Gubernur, Sekda, Inspektur, Kadis Pariwisata, Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan, Ka Bappenda, Ka Bappeda, Ka BKPSDM dan OPD Terkait
2. Kabupaten Raja Ampat: Pjs. Bupati Raja Ampat, Sekda, Inspektur, Kadis Pariwisata, Kadishub, Ka Bappenda dan OPD Terkait
3. Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan RI
4. Kepala BLU Domine Eduard Osok Sorong (Bandara DEO)
5. Kepala Kantor KSOP Kelas I Sorong
6. Kepala KUPP Kelas II Raja Ampat
7. Kepala BKKPN Kupang
8. Kepala KPP Sorong
9. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sorong

a.n. Pimpinan

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi

Komisi Pemberantasan Korupsi,



*Dokumen ini ditandatangani secara digital*

Didik Agung Widjanarko

Lampiran Surat II

Nomor : B/6516/KSP.00/70-76/10/2024

Tanggal : 08 Oktober 2024

**Agenda Kegiatan**  
**Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pencegahan Korupsi**  
**Pengelolaan Kawasan Wisata Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat**  
**Sorong, 17 Oktober 2024**

No	Uraian Kegiatan	Waktu	Lokasi	Susunan Acara	Peserta
1.	Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Pencegahan Korupsi Pengelolaan Kawasan Wisata Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat	Kamis, 17 Oktober 2024 Jam 09.00 WIT- Selesai	Kantor Gubernur Papua Barat Daya	<ul style="list-style-type: none"><li>- Sambutan Pj. Gubernur Papua Barat Daya</li><li>- Sambutan dan Paparan KPK</li><li>- Pemaparan Inspektorat PBD hasil Reviu dan Pemeriksaan Pengelolaan Kawasan Wisata Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat</li><li>- Pemaparan Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan dan Kelautan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya terkait Tindak lanjut hasil reviu dan rekomendasi KPK</li><li>- Pemaparan Pemkab Raja Ampat terkait Tindak lanjut hasil reviu UPTD Dinas Pariwisata Kabupaten Raja Ampat dan rekomendasi KPK</li><li>- Paparan BKKPN Kupang Satker Raja Ampat terkait pengelolaan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Pemprov. Papua Barat Daya Pj Gubernur, Sekda, Inspektur, Ka Bappeda, Kadis Pariwisata, Ka. DPMPTSP, Ka. Bapenda, Kadis PPPK, Karo Hukum dan Kadis Perhubungan dan OPD Terkait</li><li>b. Pemkab Raja Ampat Pjs Bupati, Sekda, Inspektur, Kadis Pariwisata, Ka. Bapenda, Ka. Bappeda, Kabag Hukum, Kadis Perhubungan, Ka. DPMPTSP dan OPD Terkait</li><li>c. Kementerian Perhubungan RI<ul style="list-style-type: none"><li>- Sekretaris Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan</li><li>- Kepala BLU Domine Eduard Osok Sorong (Bandara DEO)</li><li>- Kepala Kantor KSOP Kelas I Sorong</li><li>- Kepala KUPP Kelas II Raja Ampat</li></ul></li></ul>

No	Uraian Kegiatan	Waktu	Lokasi	Susunan Acara	Peserta
				Kawasan Konservasi Perairan Kepulauan Raja Ampat - Diskusi	d. Ka KPP Pratama Sorong e. Ka BKKPN Kupang f. Ka Kanim Kelas II TPI Sorong g. KPK

a.n. Pimpinan

Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi

Komisi Pemberantasan Korupsi,



*Dokumen ini ditandatangani secara digital*

Didik Agung Widjanarko